



LKJIP 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**Jalan Jend. Sudirman No.18 Pangkalan Bun Kalimantan
Tengah**

Telp : (0532) 21195 E-mail : kesbangpolkobar@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Dengan disusunnya LKjIP ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat lebih akuntabel karena sudah terencana dan tersusun serta terpadu sesuai yang diharapkan guna mewujudkan *good governance*.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian laporan ini, kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan maupun kelemahannya, untuk itu saran dan kritik serta masukan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan akuratnya laporan ini sangat kami harapkan.

Pangkalan Bun, 21 Februari 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB.KTW.BARAT**



Drs. EDIE FAGANTI
Pembina Tk. I IV/b

NIP. 19650802 199403 1 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, dalam penyusunannya Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis digambarkan dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
1.	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik	0 kasus	0 kasus	100%	Sangat Tinggi
Capaian sasaran strategis 1					100%	
2.	Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	Prosentase penanganan konflik sosial	0%	0%	100%	Sangat Tinggi
Capaian sasaran strategis 2					100%	
3.	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Prosentase fasilitasi pendidikan politik	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Capaian sasaran strategis 3					100%	
4.	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	100%	111,11%	Sangat Tinggi
Capaian sasaran strategis 4					111,11%	
5.	Menyediakan	Persentase	90%	90%	100%	Sangat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
	kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah				Tinggi
Capaian sasaran strategis 5					100%	
5.	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	80,1 Kategori Nilai SAKIP	-	-	-
Capaian sasaran strategis 6					-	

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar 100% dengan peringkat kinerja sangat tinggi.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ke depan, sebagai berikut:

- a. Bertambahnya jumlah penugasan mandatory yang setiap tahun sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya, khususnya SDM yang dimiliki;
- b. Ketersediaan anggaran yang terbatas, karena dalam penganggaran masih bergantung dengan APBD.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Data Umum	2
1.3 Aspek Strategis	6
1.4 Permasalahan Utama	9
1.5 Landasan Hukum	9
1.6 Sistematika Penyajian	9
BAB II Perencanaan Kinerja	11
2.1 Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11
2.2 Indikator Kinerja Utama	15
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	16
2.4 Perjanjian Kinerja	17
BAB III Akuntabilitas Kinerja	23
3.1 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23
3.2 Analisis Capaian Kinerja	25
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional	38
3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
3.5 Evaluasi Kegiatan	42
3.6 Realisasi Keuangan	42
BAB IV Penutup	48
Lampiran-Lampiran	50

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	1
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Peta Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3
1.2 Data Pegawai Per 31 Desember 2022	4
1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai 2022	5
1.4 Data Aset Tahun 2022	6
BAB II Perencanaan Kinerja	11
2.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpo	12
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	15
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	16
2.4 Perjanjian Kinerja.....	18
2.5 Anggaran Program dan Kegiatan	18
2.6 Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2022	21
BAB III Akuntabilitas Kinerja	23
3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah	23
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022.....	24
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022	25
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	25
3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Target Jangka Menengah	26
3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022	28
3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Lampau	29
3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Target Jangka Menengah Renstra	29
3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022	31
3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	32
3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Target Jangka Menengah Renstra	32
3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022.....	35
3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	35
3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Target Jangka Menengah Renstra	35
3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022.....	37
3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	37
3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022.....	38

3.18 Efisiensi Anggaran 2022	40
3.19 Kegiatan Lintas Sektoral	42
3.20 Realisasi Anggaran Tahun 2022	43
3.21 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022.....	43
BAB IV Penutup	48
Lampiran-Lampiran.....	50

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar

BAB I Pendahuluan	
1.1 Analisi SWOT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian visi misi organisasi.

Penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 ini berpedoman pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyajikan pencapaian, pengukuran dan evaluasi atas perencanaan dan perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Data Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur pelaksana teknis di daerah dan berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,

sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sumber daya manusia yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Tabel: 1.1 Peta Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1. Kepala Badan	1. Pengelola Kepegawaian	1. Perencana Ahli Muda
2. Sekretaris	2. Pengadministrasi Umum	2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah
1) Subbag Tata Usaha	3. Pengemudi	3. Analis Kebijakan Ahli Muda
3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;	4. Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural	
4. Bidang Politik Dalam Negeri;	5. Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;	6. Analis Politik Dalam Negeri	
6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;	7. Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	
	8. Pengelola Data, Subid Kewasp. Dini dan Kerjasama Intelijen	

Sumber: Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Barat menyetarakan Jabatan Administrator Pengawas menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda.

Terkait dengan penyetaraan tersebut di atas, nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami perubahan tiga kali yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 16 Desember 2016, dan perubahan kedua Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 17 Juli 2020 serta perubahan ketiga Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 18 Agustus 2016.

Sampai dengan 31 Desember 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 32 orang Pegawai sebagaimana data berikut:

Tabel: 1.2 Data Pegawai Per 31 Desember 2022

No	Jabatan	Jumlah Pegawai Yang ada	Jenis Kelamin		Kualifikasi					Status Kepegawaian	
			Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SMA	SMP	PNS/CPNS	Kontrak
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1			1				1	
B	Jabatan Administrator										
	1. Administrator	5	4	1	3	2				5	
	2. Pengawas	1	1			1				1	
	3. Pelaksana	16	9	7		6	3	4	3	10	6
C	Jabatan Fungsional	9	8	1		9				9	
	Jumlah	32	23	9	3	19	3	4	3	26	6

Sumber: Data Pegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Per 31 Desember 2022

Kebutuhan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat baik jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, apabila dibandingkan dengan kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai 2022

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
Sekretariat	Verifikator Keuangan	1	0	1
	Pengelola Data	2	2	1
	Analisis Pelaporan Keuangan	1	0	1
	Pengadministrasian Keuangan	1	0	1
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	1
	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	1
	Analisis Tata Usaha	1	0	1
	Pengelola Barang Milik Negara	1	0	1
Jabatan Fungsional	Analisis Ketahanan Sosial	1	0	1
	Analisis Organisasi Masyarakat	1	0	1
	Pengadministrasian Umum	8	1	7
	Pranata Pemilu	1	0	1
	Analisis Pemilu	1	0	1
	Analisis Pengawasan Masyarakat	1	0	1
	Analisis FKDM	1	0	1
	Analisis Wawasan Kebangsaan	1	0	1
	Analisis Ideologi	1	0	1
	Analisis Dialog dan Wawasan Multikultural	1	0	1
TOTAL		26	3	23

Sumber: Data Diolah

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2022, rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 1.4 Data Aset Tahun 2022

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	Tanah	2	152.990.000
2	Peralatan & Mesin	Alat-alat Besar	-	
		Alat-alat Angkut	8	354.907.800
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	32	49.030.000
		Alat Studio Komunikasi	6	23.518.800
		Alat Laboratorium	-	-
		Alat Persenjataan	-	-
		Alat Komputer	86	55.654.100
		DII (diisi sesuai dengan Jenis di KIB)	-	-
3	Gedung & Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	1	1,339,869,600
		Gedung Rumah Dinas	-	-
		DII (diisi sesuai dengan Jenis di KIB)	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan	-	-
		Jembatan	-	-
		Instalasi Listrik dan Telp	1	570.0000
5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	28	3.654.600
		Barang Bercorak Kesenian	-	-
6	Aset Lainnya	Aset Tak Berwujud	-	-
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-

Sumber: Data Kartu Inventaris Barang 2022

1.3 Aspek Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

1. Sumber daya manusia (aparatur) yang terbatas dalam SKPD, sehingga dapat menyebabkan kinerja yang lamban dan kurang efisien..

2. Komitmen seluruh *stakeholders* selaku mitra kerja Badan Kesbangpol sebagai upaya memelihara kondisi sosial masyarakat yang aman dan kondusif serta memegang teguh nilai-nilai kebangsaan.

Gambar: 1.1 Analisis SWOT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



		Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	
		Dengan adanya Mou antar pemerintah daerah Kab.Ktw.barat dgn Pemerintah Kab. Banyuwangi kemungkinan dapat merubah pola pikir (mindset) aparatur kesbangpol untuk meningkatkan kinerja	Kurangnya SDM dalam SKPD	Daya serap realisasi fisik dan keuangan yang lamban
		Adanya kerjasama dengan instansi vertikal (keamanan daerah) yang membantu badan kesbangpol dalam rangka memelihara kamtrantibmas	Kinerja aparatur yang bekerja selalu menunggu anggaran	Kurangnya pemahaman dan partisipasi politik masyarakat
		Adanya forum-forum binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya	Masalah kelembagaan atau SOTK yang tumpang tindih antar SKPD	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang organisasi dan lembaga kemasyarakatan
Opportunity (Peluang)		S+O	W+O	
Adanya political will dari Pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kerukunan umat beragama		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan sebagai Upaya Mewujudkan Kondisi Sosial Masyarakat yang Kondusif	Peningkatan Kapasitas Aparatur Sebagai Upaya Menciptakan Pelayanan Kesbangpol yang Unggul	Optimalisasi Data Base Kesbangpol sebagai upaya Efektivitas Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Masyarakat Melalui Program dan Kegiatan Baru (Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan)
Threats (Ancaman)		S+T	W+T	
Menurunnya kebanggaan terhadap pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional	Adanya wacana menjadikan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik menjadi urusan pusat/instansi vertikal	Sinergitas <i>Stakeholders</i> sebagai Upaya Memelihara Kondisi Sosial Masyarakat yang Aman dan Kondusif dan Memegang Teguh Nilai-Nilai Kebangsaan	Optimalisasi Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam Memelihara Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	
Pergeseran nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat dikarenakan melupakan sejarah perjalanan perjuangan bangsa	Masih adanya isu-isu yang bernuansa SARA yg dapat menimbulkan konflik antar etnis, agama dan golongan			
Kerawanan adanya gesekan pada pemilu dan pemilukada serentak	Rawan terjadinya konflik antar suku karena banyaknya warga pendatang dari berbagai daerah.			

1.4 Permasalahan Utama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan pelaksana teknis di daerah dan berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh sejauh mana mampu memecahkan masalah yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 adalah sumber daya manusia (aparatur) yang terbatas dan ketersediaan anggaran yang terbatas.

1.5 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.6 Sistematis Penyajian

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2022. Capaian kinerja 2022 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2019-2022.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2022 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja

(*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

Kata Pengantar

- i. Ikhtisar Eksekutif
- ii. Daftar isi
- iii. Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Data Umum
- 1.3 Aspek Strategis
- 1.4 Permasalahan Utama
- 1.5 Landasan Hukum
- 1.6 Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Rencana Kinerja Tahunan
- 2.4 Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Solusi Atas Permasalahan

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana Strategis berisi penjabaran operasional dari RPJMD 2017-2022 yang tercascade pada tujuan, sasaran dan program kegiatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selama lima tahun. Tahun 2022 ini merupakan tahun akhir masa RPJMD. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMD yaitu:

**“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN
DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”**

Visi ini berorientasi pada kata **IKHLAS**, yaitu:

I = IPTEK DAN INFRASTRUKTUR,
K = KETAKWAAN,
H = HARMONIS,
L = LANGGENG,
A = AMAN,
S = SEJAHTERA.

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral **NURANI**, yaitu:

N = NASIONALIS,
U = UNGGUL,
R = RELIGIUS,
A = AMANAH,
N = NYATA,
I = INSPIRATIF

Adapun misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah misi yang **keempat** dan **kelima** yaitu:

4. “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat”
5. “Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenram, dan Dinamis”

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022.

Tabel: 2.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022 dan 2019 – 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahunan						Target Akhir Renstra
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA	n/a	80%	85%-	90%	95%	100%	100%
2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial untuk meningkatkan kewaspadaan nasional	Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban yg kondusif serta pencegahan dan penanganan adanya konflik.	Jumlah konflik sosial	n/a	10 Kasus					

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan						Target Akhir Renstra
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3	Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	n/a	85%	85%	90%	95%	100%	90%
		Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Indeks pemahaman politik masyarakat	n/a	80%	85%	90%	95%	100%	100%
4	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Presentase Ketercukupan Administrasi Perkantoran	n/a	80%	85%	90%	95%	100%	100%
		Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Presentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	n/a	80%	85%	90%	95%	100%	100%
			Presentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	n/a	80%	85%	90%	95%	100%	100%
			Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	n/a	80%	85%	90%	95%	100%	100%

Sumber: Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2017-2022

Berdasarkan hasil evaluasi sakip oleh Kemenpan RB tanggal 13 agustus 2019 di Palangka Raya maka sasaran dan indikator pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami perubahan tersebut terangkum dalam tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA	-	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
2	Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pencegahan dan penanganan adanya konflik	Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	Prosentase penanganan konflik sosial	-	0%	0%	0%	0%
4	Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	90%	90%	90%	90%
		Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Prosentase fasilitasi pendidikan politik	-	100%	100%	100%	100%
5	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	-	90%	90%	90%	90%
		Menyediakan	Nilai SAKIP	-	80,1	80,1	80,1	80,1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	
		dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	perangkat daerah		Kategori nilai SAKIP	Kategori nilai SAKIP	Kategori nilai SAKIP	Kategori nilai SAKIP

Sumber: Review Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2019-2022

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel: 2.2 Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA	Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA yg ditangani	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa	Laporan Bidang Bina Ideologi dan Wasbang
Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pencegahan dan penanganan	Prosentase penanganan konflik sosial	Jumlah konflik yang ditangani dibagi jumlah konflik dikali 100%	Bidang. Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Nasional	Laporan hasil pemantauan/monitoring dan Laporan Rencana Aksi Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
adanya konflik				
Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Prosentase fasilitasi pendidikan politik	Jumlah pembinaan pendidikan politik dibagi jumlah pendidikan politik yang difasilitasi dikali 100%	Bidang Politik Dalam Negeri	Data Laporan Bidang Poldagri
Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Ormas/LSM yang aktif dibagi jumlah keseluruhan ormas/LSM yang terdaftar dikali 100%	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas	Data Base Ormas/LSM

Sumber: SK Kepala Badan Kesbangpol Nomor : 300/026/KESBANG.I/2021

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja tahunan diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana terlampir. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel: 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	80,1 Kategori Nilai SAKIP
2.	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	dalam melaksanakan tugas dan fungsi	daerah	
3.	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik	0 kasus
4.	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Prosentase fasilitasi pendidikan politik	100%
5.	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%
6.	Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	Prosentase penanganan konflik sosial	0%

Sumber: Data Diolah

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2022 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kotawaringin Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Tabel: 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Jumlah penyelesaian potensi konflik bemuansa SARA agar tidak menjadi konflik	0 kasus
2.	Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	Prosentase penanganan konflik sosial	0%
3.	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Prosentase fasilitasi pendidikan politik	100%
4.	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%
5.	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	90%
6.	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	80,1 Kategori Nilai SAKIP

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, maka struktur program dan kegiatan yang terkait langsung dan penunjang dalam mencapai sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.5 Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Sasaran: Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan			
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	290.616.250	786.322.060	495.705.810
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	290.616.250	786.322.060	495.705.810
Penyusunan Program Kerja di Bidang	149.049.750	592.070.160	443.020.410

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	141.566.500	194.251.900	52.685.400
Sasaran: Prosentase penanganan konflik sosial				
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		1.404.999.500	2.035.764.500	630.765.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.404.999.500	2.035.764.500	630.765.000
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40.000.000	40.000.000	0
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.138.999.700	1.771.629.700	632.630.000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	225.999.800	224.134.800	1.865.000
Sasaran: Prosentase fasilitas pendidikan politik				
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan serta Budaya Politik		2.040.479.270	2.131.014.270	90.535.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.040.479.270	2.131.014.270	90.535.000
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	58.024.400	113.024.400	55.000.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	9.999.770	9.999.770	0
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan darr Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.955.480.000	1.955.480.000	0
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16.975.100	52.510.100	35.535.000
Sasaran: Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif			
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	68.999.525	52.762.190	16.237.335
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	68.999.525	52.762.190	16.237.335

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	35.096.475	18.859.140	16.237.335
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25.362.150	25.362.150	0
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.540.900	8.540.900	0

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2022

Tabel: 2.6 Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Sasaran: Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		359.278.895	454.281.114	95.002.219
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.640.000	39.822.000	11.182.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.600.000	15.000.000	3.600.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.040.000	24.822.000	14.782.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		123.821.475	142.088.325	18.266.850
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.489.102	2.489.102	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.995.431	25.995.431	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.226.942	24.550.792	4.323.850
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.110.000	89.053.000	13.943.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah	6.383.456	53.156.825	46.773.369

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.383.456	53.156.825	46.773.369
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		170.743.684	189.523.684	18.780.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.319.540	74.669.540	10.350.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.424.144	114.854.144	8.430.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		29.690.280	29.690.280	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.693.280	19.693.280	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.997.000	9.997.000	0
Sasaran: Nilai SAKIP perangkat daerah				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.768.350.560	3.876.453.866	108.103.306
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.776.300	78.688.400	7.912.100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.947.200	38.044.200	4.097.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.829.100	40.644.200	3.815.100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.697.574.260	3.797.765.466	100.191.206
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.633.313.160	3.737.551.464	104.238.304
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.049.600	41.002.100	47.500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.211.500	19.211.902	3.999.598

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja 2022 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Pengukuran Laporan Kinerja 2022 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

3.1. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja terdapat 6 (enam) sasaran yang dicapai yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
1.	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik	0 kasus	0 kasus	100%	Sangat Tinggi
Capaian sasaran strategis 1					100%	
2.	Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	Prosentase penanganan konflik sosial	0%	0%	100%	Sangat Tinggi
Capaian sasaran strategis 2					100%	
3.	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Prosentase fasilitasi pendidikan politik	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Capaian sasaran strategis 3					100%	
4.	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	100%	111,11%	Sangat Tinggi
Capaian sasaran strategis 4					111,11%	
5.	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	90%	90%	100%	Sangat Tinggi
Capaian sasaran strategis 5					100%	
6.	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	80,1 Kategori Nilai SAKIP	-	-	-
Capaian sasaran strategis 6					-	

Sumber: Data diolah

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis diuraikan dibawah ini:

1 Sasaran: Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan

Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja: Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA	kasus	0	0	100%

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	80%	88,11 %	-	-	-	-	100%	110%	-	-	-	-

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
(Indikator kinerja sebelum Reviu Renstra)												
Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA (Indikator kinerja setelah Reviu Renstra)	-	-	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	-	-	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina (Indikator kinerja sebelum Reviu Renstra)	80%	80%	-	-	-	-	80%	88,11%	-	-	-	-
Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa	-	-	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	-	-	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022						
SARA agar tidak menjadi konflik SARA (Indikator kinerja setelah Reviu Renstra)													

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat **“Tercapai”**.

Adapun analisis penyebab tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi dan konsolidasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai sebagai ujung tombak dalam menjaga keharmonisan dan toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dengan Badan Kesbangpol sebagai koordinator dan fasilitator;
2. Melaksanakan sosialisasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di 6 (Enam) Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Melaksanakan sosialisasi dan evaluasi pembentukan FPK di Kec. Pangkalan Lada dan Kecamatan Kumai;
4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi revolusi mental sebagai gerakan memperbaiki dan membangun karakter bangsa dan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong;
5. Mengikuti pelaksanaan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda;
6. Melaksanakan kegiatan kaji Banding Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
7. Melaksanakan sosialisasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang bertujuan menambah ilmu pengetahuan tentang

kebangsaan dan membangun NKRI serta meningkatkan rasa nasionalisme.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 1 ini telah tercapai kinerjanya.

2 Sasaran: Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial

Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja : Prosentase penanganan konflik sosial
Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase penanganan konflik sosial	%	0	0	100%

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah konflik sosial (Indikator kinerja sebelum Reviu Renstra)	N/A	9 kasus	-	-	-	-	N/A	90%	-	-	-	-
Prosentase penanganan konflik sosial (Indikator kinerja setelah Reviu Renstra)	-	-	0%	0%	0%	0%	-	-	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah konflik sosial (Indikator kinerja sebelum Reviu Renstra)	N/A	10 kasus	-	-	-	-	N/A	9 kasus	-	-	-	-
Prosentase penanganan konflik sosial	-	-	0%	0%	0%	0%	-	-	0%	0%	0%	0%

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat **“Tercapai”**.

Adapun analisis penyebab tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Pemantauan Orang Asing berdasarkan SK Bupati;
2. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
3. Melakukan pemantauan dan monitoring keamanan/patroli cipta kondisi dan bermitra bersama instansi vertikal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Berkoordinasi dan konsolidasi bersama Forkopimda dan Forkopimcam;
5. Menyusun dan melaporkan Rencana Aksi Daerah (RAD) hasil dari pencegahan dan penanganan konflik social;
6. Monitoring potensi konflik di 6 Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 2 ini telah tercapai kinerjanya.

3 Sasaran: Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik

Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja: Prosentase fasilitasi pendidikan politik
Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase fasilitasi pendidikan politik	%	100	100	100%

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks pemahaman politik masyarakat (Indikator kinerja sebelum Reviu Renstra)	80%	100%	-	-	-	-	100%	125%	-	-	-	-
Prosentase fasilitasi pendidikan politik (Indikator kinerja setelah Reviu Renstra)	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks pemahaman politik masyarakat (Indikator kinerja sebelum Reviu Renstra)	80%	80%	-	-	-	-	80%	100%	-	-	-	-
Prosentase fasilitasi pendidikan politik (Indikator	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022						
kinerja setelah Reviu Renstra)													

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat **“Tercapai”**.

Adapun analisis penyebab tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi/Penyuluhan Pendidikan Politik Masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan Partai Politik.
3. Melaksanakan pelatihan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Partai Politik.
4. Monitoring/Pemantauan Perkembangan Dinamika Situasi Politik di 6 (Enam) Kecamatan.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan serta Budaya Politik dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

- Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.
 - c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan darr Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan darr Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 3 ini telah tercapai kinerjanya.

4 Sasaran: Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan

Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja: Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif
- Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	90	100	111,11%

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	62,24 %	65,09 %	90%	92%	100%	100%	77,81 %	76,58 %	100%	102%	111,11%	111,11%

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	85%	90%	90%	90%	90%	62,24%	65,09%	90%	92%	100%	100%

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat **“Tercapai”**.

Adapun analisis penyebab tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan terhadap Ormas/LSM
2. Rapat koordinasi bersama Tim Pengawas Ormas dan rapat dengan pengurus Ormas/LSM Se Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Memfasilitasi dan melayani koordinasi / konsultasi tentang pendaftaran surat keterangan keberadaan Ormas
4. Melaksanakan pemantauan / monitoring untuk melakukan pendataan terhadap keberadaan sekretariat Ormas/LSM yang di Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Rapat koordinasi bersama P4GN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 4 ini telah tercapai kinerjanya.

5 Sasaran: Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan

Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja: Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	90	100	111,11%

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	62,24 %	65,09 %	90%	92%	100%	100%	77,81 %	76,58 %	100%	102%	111,11%	111,11%

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	85%	90%	90%	90%	90%	62,24%	65,09%	90%	92%	100%	100%

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat **“Tercapai”**.

Adapun analisis penyebab tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan terhadap Ormas/LSM
2. Rapat koordinasi bersama Tim Pengawas Ormas dan rapat dengan pengurus Ormas/LSM Se Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Memfasilitasi dan melayani koordinasi / konsultasi tentang pendaftaran surat keterangan keberadaan Ormas
4. Melaksanakan pemantauan / monitoring untuk melakukan pendataan terhadap keberadaan sekretariat Ormas/LSM yang di Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Rapat koordinasi bersama P4GN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 5 ini telah tercapai kinerjanya.

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tidak ada perbandingan capaian dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang ditargetkan setiap tahunnya.

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sesuai dengan rumus pengukuran tingkat efisiensi sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran I

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja keuangan dan kinerja indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel: 3.18 Efisiensi Anggaran 2022

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Anggaran			Efisiensi %
		Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	90%	90%	100%	4.277.578.155	4.243.332.153	97,98	2,02
Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik	0 kasus	0 kasus	100	786.322.060	758.958.480	96,52	3,48
Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan	Prosentase penanganan konflik sosial	100%	100%	100	2.035.764.500	2.035.454.750	99,98	0,02

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Anggaran			Efisiensi %
		Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
konflik sosial								
Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Prosentase fasilitasi pendidikan politik	100%	100%	100	2.131.014.270	2.117.719.880	99,38	0,62
Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	100%	111,11	52.762.190	52.529.050	99,56	0,44
Total efisiensi anggaran								1,38

Sumber: Data diolah

Total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 sebesar Rp. 9.336.598.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.207.994.313,- atau **98,62%** sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.128.603.687,- atau **1,38%**.

Dari tabel tersebut di atas, efisiensi dapat dicapai karena:

1. Efisiensi pada sasaran I sebesar 2,02% digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penunjang / operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Efisiensi pada sasaran II sebesar 3,48% digunakan untuk pelaksanaan sosialisasi dan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tingkat kecamatan.
3. Efisiensi pada sasaran III sebesar 0,02% digunakan untuk pelaksanaan pemantauan cipta kondisi keamanan daerah dan Rapat koordinasi bersama Forkopimda.
4. Efisiensi pada sasaran IV sebesar 0,62% digunakan untuk pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik masyarakat.

5. Efisiensi pada sasaran V sebesar 0,44% digunakan untuk pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta Rapat Koordinasi bersama P4GN.

Selain dari sisi anggaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga mengembangkan kerja sama Lintas Sektoral. Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan lintas sektoral adalah sebagai berikut:

Tabel: 3.19 Kegiatan Lintas Sektoral

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
1	Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dan Hari Sumpah Pemuda	Dispora	Fasilitasi penyediaan uang saku kegiatan	Dokumen Pelaporan IKBAB	Mendukung dalam meningkatkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dikalangan pemuda-pemudi Kobar

Sumber: Data diolah

3.5 Inovasi Kegiatan

Untuk Inovasi Kegiatan dapat diinformasikan sampai saat ini belum terdapat inovasi, telah diupayakan agar dapat mengembangkan inovasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.6 Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat menganggarkan Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp.7.932.724.000,- pada anggaran murni dan

setelah perubahan pada Anggaran Perubahan (DPPA) menjadi sebesar Rp.9.336.598.000,- Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp9.207.994.313,- atau sebesar 98,62%. Data anggaran dan realisasi DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel: 3.20 Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Belanja Operasional	9.283.441.175,00	9.154.844.183,00	98,61
	- Belanja Pegawai	3.737.551.464,00	3.668.771.047,00	98,16
	- Belanja Barang dan Jasa	2.495.409.711,00	2.435.593.136,00	97,60
	- Belanja Hibah	3.050.480.000,00	3.050.480.000,00	100,00
2	Belanja Modal	53.156.825,00	53.150.130,00	99,99
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.156.825,00	53.150.130,00	99,99
	TOTAL	9.336.598.000,00	9.207.994.313,00	98,62

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol 2022

Untuk rincian realisasi keuangan per kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: 3.21 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.330.734.980	4.243.332.153	97,98%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.688.400	78.399.302	99,63%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.044.200	37.922.174	99,68%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.644.200	40.477.128	99,59%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.797.765.466	3.726.968.657	98,14%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.737.551.464	3.668.771.047	98,16%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.002.100	39.069.310	95,29%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.211.902	19.128.300	99,56%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.822.000	39.643.580	99,55%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000	15.000.000	100,00%
Bimbingan Teknis Implementasi	24.822.000	24.643.580	99,28%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Peraturan Perundang-Undangan			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.088.325	141.673.780	99,71%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.489.102	2.489.102	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.995.431	25.995.431	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.550.792	24.550.792	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.053.000	88.638.455	99,53%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.156.825	53.150.130	99,99%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.156.825	53.150.130	99,99%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.523.684	174.592.585	92,12%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.669.540	60.104.657	80,49%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.854.144	114.487.928	99,68%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.690.280	28.904.119	97,35%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.693.280	18.907.119	96,01%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.997.000	9.997.000	100,00%
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	786.322.060	758.958.480	96,52%
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	786.322.060	758.958.480	96,52%
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	592.070.160	577.783.780	97,59%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	194.251.900	181.174.700	93,27%
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan serta Budaya Politik	2.131.014.270	2.117.719.880	99,38%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.131.014.270	2.117.719.880	99,38%
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	113.024.400	105.453.310	93,30%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	9.999.770	9.624.770	96,25%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan darr Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.955.480.000	1.955.480.000	100,00%
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	52.510.100	47.161.800	89,81%
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	52.762.190	52.529.050	99,56%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	52.762.190	52.529.050	99,56%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	18.859.140	18.666.000	98,98%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25.362.150	25.322.150	99,84%
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.540.900	8.540.900	100,00%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		2.035.764.500	2.035.454.750	99,98%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.035.764.500	2.035.454.750	99,98%
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40.000.000	39.977.250	99,94%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.771.629.700	1.771.517.700	99,99%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	224.134.800	223.959.800	99,92%
TOTAL		9.336.598.000	9.207.994.313	98,62

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja keuangan tahun 2022 adalah sebesar 98,62% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Sangat Tinggi”.

BAB IV

PENUTUP

Hasil laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 sebesar 102,22 % dengan peringkat kinerja **sangat tinggi**.
2. Capaian kinerja keuangan 98,62% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.207.994.313 sehingga masuk dalam peringkat kinerja **sangat tinggi**.

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman aparatur terkait sasaran strategis dan indikator sasaran;
2. Capaian Kinerja yang disusun masih berbentuk laporan pelaksanaan kegiatan, harus dilakukan evaluasi internal setiap akhir tahun pelaporan.

Untuk meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang maka Badan Kesbangpol berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran dan fungsi masing-masing bidang teknis dalam mendukung tercapainya sasaran strategis dan indikator kinerja yang lebih terukur.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi bersama dengan semua unsur yang menjadi mitra kerja Badan Kesbangpol sebagai elemen pendukung dalam pencapaian sasaran strategis.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 21 Februari 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Drs. EDIE FAGANTI
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19650802 199403 1 010

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telp. (0832) 21195 Fax. (0832) 21804
 PANGKALAN SUN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR : 300/26/KESBANG.1/2021

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 PERIODE TAHUN 2019-2022**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sebagai tindak lanjut atas perubahan atau hasil revidi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

- 1 -

SK Kepala Badan Kesbangpol tentang Perubahan IKU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. EDIE FAGANTI**
 Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H**
 Jabatan : Bupati Kotawaringin Barat
 selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotawaringin Barat, Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
 
Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H **Drs. EDIE FAGANTI**
 Pembina Tk. I IV/b
 NIP. 19650802 199403 1 010

Perjanjian Kinerja Murni Kepala Badan Kesbangpol

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas / Badan / Unit Setoran Kerja : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KTW. BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I	2	3	4
I	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap dialog dan wawasan kebangsaan	Jumlah penyelesaian potensi konflik bermasalah SARA agar tidak mengad konflik SARA	0 Kasus
II	Memngkatkan peran serta aparat kesamanan dalam melaksanakan tugas dan dan pelaksanaan konflik sosial	Persentase penanganan konflik sosial	0%
III	Terwujudnya peran serta dan memabantu wawasan masyarakat tentang politik	Persentase fasilitas pendidikan politik	100%
IV	Membangun terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase kegiatan dan lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%
V	Mewujudkan kebutuhan perwujudan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat perngkat daerah	90%
VI	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	80,3 kategori nilai SAKIP

Program	Anggaran
1. Perangai Urusan Penertitatan Daerah Kabupaten/Kota	4.127.629.465 APBD
2. Perangai Bidang Pemeliharaan dan Fasilitas Kabupaten	280.818.280 APBD
3. Perangai Peta-Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Diklat Serta Dukuk Politik	2.040.479.276 APBD
4. Perencanaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	68.999.525 APBD
5. Perangai Kewaspadaan Nasional dan Perangai Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.404.999.300 APBD
Jumlah	7.922.724.800

Pangkalan Sun, Februari 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.KTW.BARAT

Drs. EDIE FAGANTI
 NIP. 19650802 199403 1 010

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	Nomor SOP	300/166/Kesbang/1/2022
	Tanggal Pembuatan	11 Agustus 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	11 Agustus 2022
Ditaskan Oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	 Dr. EDE EFADANTI NIP. 19650802 199403 1 010	
Sub Bagian Program dan Anggaran	Judul SOP	Pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Nomor 119/2016/M/Perm/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Menteri RB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rencana Kerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan MonevAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		
Keterkaitan 1. SOP Penyusunan Rencana 2. SOP Penyusunan Renc 3. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)		
Peringatan Penyusunan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2016		
Kualifikasi Pelaksanaan : 1. Memiliki pemahaman terhadap proses Pengukuran Kinerja dalam konteks AKIP 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menggunakan proses Pengukuran Kinerja 3. Mengetahui Pengukuran Perangkat komputer.		
Peralatan / Perlengkapan 1. Alat Tulis dan Komputer		
Pencatatan/Pendataan 1. Perjanjian Kinerja 2. Form Capaian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan data dukung realisasi		

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	Nomor SOP	300/161/Kesbang/1/2022
	Tanggal Pembuatan	Juli 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	1 Juli 2022
Ditaskan Oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	
	 Dr. EDE EFADANTI NIP. 19650802 199403 1 010	
Sub Bagian Program dan Anggaran	Judul SOP	Penyempurnaan/Pengumpulan Data & Informasi Kinerja Badan Kesbangpol
Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Penyelenggaraan Administrasi Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Rencana Kerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesbangpol Kab. Ktw. Barat		
Keterkaitan - SOP Penyusunan LKIP		
Peralatan / Perlengkapan 1. Peralatan Perundangan yang terkait 2. Rencitra 3. Renc 4. Indikator Kinerja Utama 5. Laptop, printer 6. Internet		
Peringatan Apabila pengumpulan data kinerja tidak terlaksana dengan baik dan besar maka sebagian pelaporan akan tertunda		
Kualifikasi Pelaksanaan : 1. Memahami peraturan perundangan yang terkait 2. Memahami laporan, usulan, indikator kinerja dan capaian indikator 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas Badan Kesbangpol 4. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan penjabarannya melalui Rencana 5. Memahami submateri teknis		
Penetapan dan Pendataan File ini disimpan di Sub Bagian Program dan Anggaran		

No.	URAIAN PROSEDUR/KEHATIHAN	PELAKSANA				Mutu Baku		Keterangan	
		SEKRETARIS	JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA	SEKRETARIS TIM SAKIP	ANGGOTA TIM SAKIP	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1.	Memeriksa untuk membuat pengukuran kinerja					Surat Masuk	10 Menit	Disposisi Pimpian	
2.	Sekretaris Tim memberikan arahan anggota tim SAKIP untuk membuat pengukuran kinerja					Disposisi dan Arahan	20 Menit	Masukan dan Arahan	
3.	Tim SAKIP membuat pengukuran kinerja bekerja sama dengan pengolah data					Bahan masukan pengukuran kinerja dari Sek. Tim SAKIP berdasarkan data tahun sebelumnya	1 Hari	Bahan data kinerja dari masing masing Kepala Bidang	SOP Baget Internal
4.	Anggota Tim merumuskan draft Dokumen Kinerja					Bahan masukan data kinerja dari masing masing Sub. Bagian	1 Hari	Draf dokumen kinerja yang siap dilampirkan ke Jabatan Fungsional Perencana	

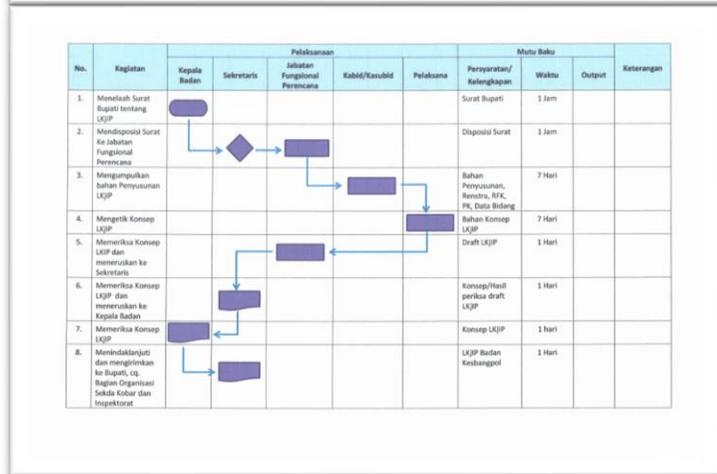
SOP Pengukuran Kinerja Badan Kesbangpol

**PROSEDUR PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.KTW.BARAT
Tahun 2022**

No.	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			Keterangan
		Kabid / Kasubid	Jabatan Fungsional Perencana	Staf	Keleengkapan	Waktu (menit)	Output	
1.	Pimpinan memerintahkan jabatan Fungsional Perencana untuk mengumpulkan data kinerja				Disposisi surat	30	Disposisi surat	
2.	Menyusun format pengumpulan data dan informasi kinerja				Perjanjian kinerja dan rencana aksi Badan Kesbangpol	180	Format data kinerja	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data kinerja ke masing masing bidang				Format data kinerja	90	Format data kinerja yang diterima oleh masing-masing bidang	
4.	Mengisi format dan data kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat				Format data kinerja yang diterima oleh masing-masing bidang	90	Format data kinerja Badan Kesbangpol yang telah diisi	
5.	Menghimpun format dan data kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat				Format data kinerja Badan Kesbangpol	960	Data kinerja yang terhimpun dari masing-masing	
6.	Menganalisa dan mengevaluasi data kinerja yang telah terkumpul				Data kinerja yang terhimpun dari masing-masing bidang	1440	Data kinerja yang telah terverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penyusunan LKIP Badan Kesbangpol	
7.	Mengompilasi data kinerja yang diujikan dasar penyusunan LKIP				Data kinerja yang telah terverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penyusunan LKIP Badan Kesbangpol	1440	Dokumen data kinerja	

SOP Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja Badan Kesbangpol

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p> <p>Sub Bagian Program dan Anggaran</p>	Nomor SOP	100/KAB/Kesbang/2022
	Tanggal Pembuatan	Januari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	Februari 2022
	Ditulis Oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
		 Dr. EDIE FAGANTI NIP. 19650802 199403 1 010
	Judul SOP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbangpol
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 4. Peraturan Menteri Pendelegasian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Rencana Aksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat.	1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Mampu membaca dokumen dasar	
Keterkaitan	Peralatan / Peralengkapan	
- Rencana Kinerja Tahunan; - Perjanjian Kinerja; - Laporan realisasi Fiskal dan Keuangan; - Laporan Keuangan	1. Dokumen RENCANA 2. Dokumen RIKK 3. Dokumen RENCANA, RPK, PK, Data Bidang 4. Laptop, printer 5. Internet	
Peringatan	Penetapan dan Pendaftaran	
LKIP disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir	File ini disimpan di Sub Bagian Program dan Anggaran	



SOP Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kesbangpol